



REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PEMERINTAH MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2023
PADA RAPAT PARIPURNA DPR-RI

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swastiastu,
Salam Kebajikan,

Yang kami hormati,
Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri Sidang Paripurna DPR RI dengan agenda “**Penyampaian Pokok-Pokok Keterangan Pemerintah atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023**”, yang selanjutnya dapat kita sebut RUU P2 APBN.

APBN adalah instrumen kebijakan yang sangat penting dan strategis bagi sebuah negara untuk mencapai cita-citanya. Oleh karenanya **APBN harus selalu dijaga agar tetap sehat, berkelanjutan, dan kredibel** agar efektif memecahkan persoalan bangsa, dan bukan justru menjadi sumber persoalan atau bahkan menciptakan krisis. Banyak contoh negara-negara di dunia yang tidak mampu mengelola dan menjaga APBN secara sehat dan tepat, sehingga menjadi sumber krisis berkelanjutan. **APBN juga harus terus dikelola secara transparan, kredibel, dan akuntabel**, sebagai wujud

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RUU P2 APBN disampaikan Pemerintah kepada DPR dalam bentuk laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. BPK memberikan **penilaian terbaik** atas **pertanggungjawaban pelaksanaan APBN TA 2023**, yaitu berupa **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023**.

Pada kesempatan ini, **kami ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan berkolaborasi** melaksanakan APBN TA 2023. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan, khususnya kepada DPR dan BPK yang senantiasa memberikan masukan dan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan tata kelola keuangan negara, pada periode sebelumnya, saat ini, maupun di masa yang akan datang.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebagai instrumen pembangunan, dalam 10 tahun terakhir, APBN menjadi sumber pendanaan penting untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Upaya meningkatkan **infrastruktur dan konektivitas, kualitas SDM, dan kesejahteraan masyarakat** telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di bidang infrastruktur, APBN telah mampu menciptakan **penambahan Jalan Tol sepanjang 1.938 km dan Jalan Nasional non-Tol sepanjang 4.574 km**. APBN juga mendukung penyediaan air baku dan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan energi, telah didukung dengan **pembangunan 37 bendungan**, serta **peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatts.**, serta **peningkatan pembangkit listrik sebesar 36,3 gigawatts.**

APBN juga berfungsi penting dalam peningkatan kualitas SDM dengan membiayai peningkatan infrastruktur sekolah yang berkontribusi terhadap **peningkatan partisipasi kasar** dari seluruh jenjang pendidikan. Untuk pendidikan tinggi, APBN melalui pemupukan Dana Abadi Pendidikan telah memberikan **Beasiswa LPDP kepada 45.496 putra-putri terbaik bangsa**, sehingga mampu meraih pendidikan terbaik di berbagai universitas di dalam maupun di luar negeri.

Melalui Anggaran di bidang Kesehatan, APBN telah mampu menunjang Kemajuan pada sektor kesehatan seperti **menurunkan angka prevalensi *stunting* dari 37,2 persen di tahun 2013 menjadi 21,5 persen di tahun 2023**. APBN juga berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui **penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25 persen pada 2014 menjadi single digit 9,36 persen di tahun 2023**. Kemiskinan ekstrem

juga telah menurun signifikan dari **6,18 persen pada 2014 menjadi 1,12 persen di tahun 2023.**

APBN menjadi **instrumen pembiayaan penting** dalam mendukung peningkatan martabat dan citra Indonesia di mata dunia melalui penyelenggaraan berbagai pertemuan dan *event* internasional secara sangat sukses seperti Asian Games, Asian Paragames, dan IMF-World Bank Group Annual Meetings pada tahun 2018, Kegiatan Presidensi G20 pada tahun 2022, Piala Dunia U-17, rangkaian kegiatan keketuaan Indonesia di KTT ASEAN, dan kegiatan MotoGP Mandalika pada tahun 2023.

Capaian kemajuan ini adalah sebagian dari berbagai capaian yang telah kita raih bersama dalam sepuluh tahun masa Pemerintahan ini. **Tentunya capaian ini bukanlah hasil kerja Pemerintah semata**, namun juga merupakan hasil kerja bersama Bapak dan Ibu Anggota Dewan dalam mengawasi pelaksanaan APBN, serta partisipasi masyarakat dalam melaksanakan dan mengawal pembangunan. Kolaborasi tersebut harus terus diperkuat agar dapat mewujudkan capaian pembangunan yang optimal untuk kemajuan bangsa dan negara.

Pimpinan dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting yang berfungsi sebagai alat **stabilisasi, distribusi, dan alokasi** - APBN selalu hadir dan diandalkan negara dalam menghadapi banyak guncangan dan ketidakpastian global dan domestik - seperti pandemi Covid-19 yang luar biasa berat dan dahsyat. **Pemerintah dan DPR terus bekerjasama secara baik** dalam merumuskan dan menentukan kebijakan fiskal (APBN) sehingga mampu merespons dan menjawab tantangan yang luar biasa tersebut.

Kondisi pandemi yang luar biasa (*extraordinary*) membutuhkan kebijakan APBN yang juga luar biasa, dimana penerimaan negara yang menurun tajam akibat berhentinya kegiatan ekonomi dan masyarakat, mengharuskan APBN mendanai belanja yang melonjak tinggi untuk menangani pandemi Covid-19 serta memulihkan perekonomian. Kebijakan APBN yang luar biasa ditunjukkan dengan besaran defisit 6,1% PDB jauh di atas batas maksimal yang diatur UU Keuangan Negara sebesar 3% PDB. Kondisi genting akibat Pandemi menyebabkan APBN bekerja luar biasa keras dalam periode 2020-2021; yang mampu memulihkan kembali ekonomi Indonesia dan sekaligus mampu mengembalikan kesehatan APBN. Konsolidasi fiskal dalam dua tahun (lebih cepat satu tahun dari perkiraan awal) termasuk tersingkat dibandingkan banyak negara baik di G20 maupun ASEAN telah menghasilkan defisit APBN turun dibawah 3% PDB pada tahun 2022. Perekonomian Indonesia kembali pulih dari kontraksi 2,07% di 2020 menjadi positif 3,7% di 2021 dan berlanjut tumbuh di 5,3% pada tahun 2022.

Namun pasca meredanya pandemi Covid-19 tidak membuat perekonomian global serta merta menjadi pulih. Tahun 2023 terjadi gejolak perekonomian global. APBN Tahun 2023 yang dirancang pada pertengahan tahun 2022 sangat diwarnai oleh perkembangan kondisi geopolitik global, khususnya perang Rusia – Ukraina. Gangguan rantai pasok global akibat perang telah menyebabkan volatilitas harga komoditas, tekanan inflasi yang berkepanjangan di banyak negara sehingga mendorong kenaikan suku bunga acuan global dan menimbulkan gejolak di pasar keuangan di sebagian besar negara berkembang.

Kondisi tersebut berimplikasi pada pelemahan pertumbuhan ekonomi di banyak negara pada tahun 2023, khususnya AS, Eropa dan Tiongkok. Berbagai analisis dan laporan lembaga internasional juga menunjukkan adanya tantangan berat yang akan dihadapi di tahun 2023, termasuk potensi krisis yang terjadi di sejumlah negara besar.

Menghadapi risiko dan volatilitas global yang melonjak tinggi, Pemerintah bersama DPR sepakat merancang **APBN TA 2023 secara hati-hati, waspada**, namun tetap **efektif dan optimistis** dalam menjaga momentum pertumbuhan. APBN 2023 kembali berperan sebagai *shock absorber* dalam menghadapi risiko guncangan ketidakpastian global dengan fokus pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Dalam pelaksanaannya, kinerja APBN TA 2023 menunjukkan perkembangan positif yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan negara dan akselerasi belanja negara, sehingga proses konsolidasi fiskal dapat dilaksanakan dengan baik sehingga kredibilitas dan sustainabilitas fiskal Indonesia terus terjaga.

Dengan berbagai kebijakan yang dilaksanakan, perekonomian Indonesia terbukti *resilient* dalam menghadapi tantangan sepanjang 2023. Terjaganya inflasi berdampak pada daya beli masyarakat yang tetap kuat di tahun 2023 sehingga mampu menopang kinerja pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5%, yakni 5,05%, di tengah menurunnya kontribusi ekspor akibat pelemahan ekonomi global.

Kinerja pertumbuhan yang kuat tersebut juga diikuti dengan terjaganya stabilitas harga. Laju inflasi tahun 2023 terkendali di level 2,6 persen (yoy), lebih rendah dari tahun sebelumnya (5,5 persen). Laju inflasi Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang masih berjuang mengendalikan inflasi di negaranya antara lain Rusia 7,4 persen, Turki di level 64,8 persen, dan bahkan Argentina yang semakin tertekan pada level 211,4 persen (yoy).

Kinerja makro fiskal dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan trend peningkatan, rasio perpajakan dijaga di level *double digit* 10,31 persen PDB. Keseimbangan primer surplus 0,46 persen PDB, merupakan posisi surplus pertama kali sejak tahun 2012, defisit fiskal yang semakin terkendali di kisaran 1,62 persen PDB dan rasio utang secara bertahap didorong semakin menurun, di kisaran 39,2 persen PDB. Dengan pengelolaan APBN yang sehat dan kredibel tersebut Pemerintah secara konsisten berupaya memelihara momentum pertumbuhan sekaligus mendorong agar reformasi struktural dapat berjalan optimal untuk mewujudkan SDM unggul dan berdaya saing, akselerasi infrastruktur dan penguatan institusional dan simplifikasi regulasi.

Melalui reformasi struktural dan disertai pengelolaan fiskal yang sehat, tingkat kesejahteraan masyarakat di tahun 2023 juga semakin membaik, hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka yang semakin menurun dari 5,86 persen di tahun 2022 menjadi 5,32 persen di tahun 2023. Sementara itu, angka kemiskinan menurun dari 9,54 persen menjadi 9,36 persen; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,77 menjadi 74,39.

Kondisi positif juga terlihat dari **Neraca Perdagangan Indonesia yang sampai Desember 2023 mencatatkan surplus berturut-turut selama 44 bulan**. Neraca Pembayaran Indonesia kembali surplus USD 6,3 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya surplus USD 4 miliar. Selain itu, dengan *Gross National Income* per kapita 2023 yang mencapai USD4.580, Indonesia kembali masuk kategori *upper middle-income country* sebagai *milestone* penting bagi Visi Indonesia Emas 2045.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Selanjutnya, izinkan kami menyampaikan intisari RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023. Dokumen RUU ini disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). RUU P2 APBN TA 2023 diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2023 meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan raihan WTP kedelapan kalinya secara berturut-turut atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Hal ini merupakan wujud konsistensi Pemerintah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Keberhasilan Pemerintah dalam meraih Opini WTP atas LKPP Tahun 2023, diharapkan

semakin memberikan keyakinan kepada seluruh masyarakat bahwa APBN dikelola secara efisien, transparan dan akuntabel. Kinerja APBN yang baik diharapkan dapat membawa manfaat berupa peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

LKPP merupakan hasil konsolidasi dari Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Oleh karena itu, kualitas LKPP sangat dipengaruhi kualitas LKKL dan LKBUN dimaksud. Untuk pelaporan keuangan tahun 2023, terdapat 80 LKKL mendapat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, dan 4 LKKL mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. Pada tahun ini, LKBUN juga kembali mendapatkan opini WTP dari BPK.

Rekapitulasi atas opini LKKL dan LKBUN tahun dalam sepuluh tahun terakhir:

Opini	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified</i>)	65	62	56	74 ^{*)}	80 ^{*)}	82 ^{*)}	85 ^{*)}	85 ^{*)}	84 ^{*)}	82 ^{*)}	81 ^{*)}
Wajar Dengan Pengecualian (<i>Qualified</i>)	19 ^{*)}	18 ^{*)}	26 ^{*)}	8	6	4	2	2	4	1	4
Tidak Menyatakan Pendapat (<i>Disclaimer</i>)	3	7	4	6	2	1	1	-	-	-	-
Tidak Wajar (<i>Adverse</i>)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	87	87	86	88	88	87	88	87	88	83	85

^{*)} Termasuk LKBUN

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Sesuai ketentuan, **LKPP Tahun 2023 terdiri atas tujuh komponen laporan**, yaitu: (1) Laporan Realisasi APBN, (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (3) Neraca, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertai dengan Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara dan Badan Lainnya. Seluruh kinerja keuangan negara selama tahun 2023, tercermin dalam LKPP Tahun 2023. **Ringkasan dari masing-masing laporan** tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

Dalam Laporan Realisasi APBN TA 2023 ditunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai Rp2.783,9 triliun (105,56% dari target) atau tumbuh 5,62% dari 2022. Penerimaan Perpajakan Rp2.154,2 triliun (101,69% target), Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp612,5 triliun (118,75% target) dan Penerimaan Hibah Rp17,2 triliun. Pencapaian

pendapatan negara yang baik tersebut utamanya dipengaruhi oleh penguatan pemulihan aktivitas ekonomi, kenaikan harga komoditas pada tahun sebelumnya, dan implementasi UU HPP yang mampu meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak, serta peningkatan kualitas dan inovasi layanan publik.

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2023 sebesar Rp2.154,2 triliun atau mencapai 101,69 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp2.118,3 triliun. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2023 meningkat sebesar Rp119,6 triliun atau 5,88 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp2.034,5 triliun. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari Pajak Dalam Negeri sebesar Rp2.089,7 triliun dan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp64,6 triliun. Berkat kerja keras seluruh komponen bangsa, dalam tiga tahun berturut-turut sejak 2021, realisasi Penerimaan Perpajakan melampaui target APBN. Kinerja positif Penerimaan Perpajakan didukung oleh penguatan aktivitas ekonomi domestik, efektivitas implementasi UU HPP yang mampu meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis perpajakan, ditengah moderasi harga komoditas.

Realisasi PNBP TA 2023 sebesar Rp612,5 triliun atau mencapai 118,75 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN sebesar Rp515,8 triliun. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2023 meningkat sebesar Rp16,9 triliun atau 2,84 persen lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp595,6 triliun. Kontribusi terbesar realisasi pendapatan dari PNBP berasal dari PNBP Sumber Daya Alam yang mencapai Rp254,2 triliun atau 41,50 persen dari total realisasi PNBP. Selanjutnya Realisasi PNBP Lainnya sebesar Rp180,4 triliun yang berkontribusi 29,45 persen dari total realisasi PNBP, realisasi Pendapatan BLU sebesar Rp95,9 triliun yang berkontribusi 15,65 persen dari total realisasi PNBP, serta realisasi Penerimaan dari Kekayaan Negara Dipisahkan sebesar Rp82,1 triliun berkontribusi sebesar 13,40 persen dari total realisasi PNBP. Peningkatan realisasi PNBP terutama didukung oleh membaiknya kinerja Badan Usaha Milik Negara terutama BUMN Perbankan, penyesuaian tarif iuran produksi/royalti batu bara, serta membaiknya kinerja dan inovasi layanan Kementerian/Lembaga.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2023 sebesar Rp17,2 triliun atau 554,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp3,1 triliun. Realisasi Penerimaan Hibah TA 2023 meningkat sebesar Rp11,5 triliun atau 201,69 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5,7 triliun. Peningkatan realisasi Penerimaan Hibah terutama untuk dukungan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2024, pencegahan dan pengendalian penyakit, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Belanja Negara baik dalam bentuk belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke Daerah memiliki peran yang strategis dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan. **Realisasi Belanja Negara mencapai Rp3.121,2 triliun atau 100,13 persen dari pagu APBN TA 2023.** Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp2.239,8 triliun serta Transfer ke Daerah Rp881,4 triliun. Realisasi Belanja Negara tersebut meningkat Rp24,9 triliun atau 0,81 persen dibandingkan dengan TA 2022. Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi optimalisasi peran APBN TA 2023 sebagai *shock absorber* untuk melindungi daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas perekonomian, ditengah risiko ketidakpastian perekonomian global yang eskalatif, serta upaya untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi Covid-19.

Berbagai hasil pembangunan yang dibiayai oleh Belanja Negara pada APBN TA 2023, secara nyata dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di berbagai bidang. Pada bidang infrastruktur, pemerintah telah menyelesaikan antara lain: pembangunan 6 Bendungan, 4 ruas jalan tol sepanjang 240 km, jalan 536,02 km, jembatan 7.940,26 m, dan *flyover* 2.325,33 m. Selain itu, untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas terutama di wilayah 3 T (tertinggal, terdepan, dan terluar) telah dibangun 7 bandara baru dan diluncurkan satelit Satria-1 untuk mendukung pemerataan konektivitas jaringan internet di daerah terpencil.

Pada bidang pendidikan, selain untuk pembayaran gaji guru dan tenaga pendidik ASN baik pusat maupun daerah, bantuan pendanaan bagi PTNBH, serta rehabilitasi dan renovasi 902 unit bangunan SD dan sekolah menengah di seluruh Indonesia, Pemerintah melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 20,3 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk lebih dari 900 ribu mahasiswa, pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus dan insentif bagi 348 ribu guru dan kepala sekolah non PNS, penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk 43,7 juta peserta didik, dan berbagai program lainnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Di samping itu, dalam bidang kesehatan, pemerintah telah melaksanakan penyaluran bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta jiwa, penugasan khusus kepada lebih dari 5 ribu tenaga kesehatan dan perbaikan instrumen lainnya untuk mendukung kualitas kesehatan masyarakat. Sedangkan pada bidang perlindungan sosial, Pemerintah telah menyalurkan kartu sembako untuk 18,8 juta keluarga, BLT El Nino untuk 18,8 juta keluarga, kartu prakerja bagi 1,1 juta peserta, subsidi bunga KUR untuk 4,4 juta debitur, belanja subsidi listrik untuk 620 *terawatt hour* dan pembayaran kompensasi atas

penetapan Harga Jual Eceran BBM Rp133,1 triliun, serta pembayaran kompensasi atas penetapan Tarif Tenaga Listrik Rp72,9 triliun.

Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Negara, terdapat Defisit Rp337,3 triliun atau 1,61 persen PDB yang jauh lebih rendah dari target APBN TA 2023, sebesar 2,27 persen PDB dan juga lebih kecil dibandingkan defisit 2022, yaitu 2,35 persen PDB. APBN TA 2023 juga mencatatkan surplus keseimbangan primer Rp102,59 triliun, merupakan surplus pertama kalinya sejak tahun 2012. Keseimbangan primer sempat jatuh sangat dalam hingga Rp634 triliun pada tahun pertama pandemi covid-19. Namun dengan berbagai upaya optimalisasi pendapatan dan disiplin belanja, dalam tiga tahun Keseimbangan Primer berhasil mencapai surplus.

Realisasi Defisit tersebut berimplikasi pada realisasi Pembiayaan TA 2023. Realisasi Pembiayaan TA 2023 Rp356,7 triliun atau hanya 74,32 persen dari rencana dalam APBN yang sebesar Rp479,9 triliun. Realisasi Pembiayaan ini menurun Rp234,3 triliun atau 39,65 persen dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan 2022. Langkah penurunan defisit dan pembiayaan yang sangat signifikan, memperkuat posisi fiskal, dan nilai Surat Berharga Negara, sehingga *yield* suku bunga utang dapat ditekan dan *spread* terhadap suku bunga Amerika Serikat dapat dijaga/diminimalkan, ditengah lonjakan suku bunga global yang luar biasa (*high for longer*). Dengan defisit dan realisasi pembiayaan tersebut, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp19,4 triliun, menurun signifikan jika dibandingkan dengan SiLPA 2022 Rp130,6 triliun. Penurunan SiLPA menunjukkan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR agar pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien sehingga menghasilkan besaran SiLPA yang minimal.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan ditambah/dikurangi penyesuaian lain yang diperkenankan. Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), dijelaskan bahwa SAL awal 2023, Rp478,9 triliun. Terdapat penggunaan SAL sebagai sumber pendanaan APBN TA 2023 Rp35,0 triliun. Setelah memperhitungkan SiLPA dan penyesuaian SAL, maka SAL akhir 2023 menjadi Rp459,5 triliun. SAL tersebut menjadi instrumen penting dalam pengelolaan APBN sebagai “*fiscal buffer*” atau “bantalan pengaman” yang efektif melindungi APBN dan perekonomian

Indonesia dalam menghadapi berbagai guncangan, tekanan, dan ketidakpastian lingkungan global dan domestik pada tahun 2024.

Posisi keuangan Pemerintah ditunjukkan dalam **Neraca per 31 Desember 2023 yang terdiri dari Aset Rp13.072,8 triliun, Kewajiban Rp9.536,7 triliun, dan Ekuitas Rp3.536,1 triliun**

Aset Pemerintah sebesar Rp13.072,8 triliun, adalah lebih tinggi Rp747,4 triliun atau 6,06 persen dari Aset Pemerintah per 31 Desember 2022. Aset Pemerintah tersebut terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp894,4 triliun, Investasi Jangka Panjang sebesar Rp4.077,2 triliun, Aset Tetap sebesar Rp6.964,3 triliun, Properti investasi sebesar Rp104,4 triliun, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp49,2 triliun, serta Aset Lainnya sebesar Rp983,3 triliun. Peningkatan nilai aset pemerintah tidak terlepas dari membaiknya kinerja BUMN perbankan yang mencatatkan peningkatan laba bersih di tahun 2023. Disamping itu pencatatan aset properti investasi pada OIKN juga berkontribusi terhadap kenaikan nilai aset pemerintah secara keseluruhan.

Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.536,7 triliun, meningkat Rp616,1 triliun atau 6,91 persen dari Kewajiban Pemerintah per 31 Desember 2022. Kewajiban Pemerintah tersebut terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.092,2 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp8.444,4 triliun. Peningkatan kewajiban Pemerintah pada Tahun 2023 sebagian besar berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto, yang digunakan terutama untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas, termasuk pembangunan infrastruktur, pemenuhan alutsista, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sementara itu, Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.536,1 triliun, yang berarti lebih tinggi Rp131,2 triliun atau 3,85 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2022. Kenaikan ekuitas tahun 2023 tanpa revaluasi aset merupakan pertama kalinya sejak pelaporan keuangan berbasis akrual diterapkan. Hal ini tidak terlepas dari baiknya kinerja penerimaan yang diikuti dengan belanja pemerintah yang juga semakin berkualitas.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode. Laporan Operasional menyajikan pendapatan dan beban akrual serta Surplus/Defisit Laporan Operasional. Dalam **Laporan Operasional (LO) Tahun 2023 disampaikan bahwa Pendapatan Operasional Rp3.083,2 triliun dan Beban Operasional Rp3.111,7 triliun**, yang membentuk Defisit

dari Kegiatan Operasional Rp28,4 triliun. Di sisi lain, terdapat Surplus dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp60,1 triliun, yang membentuk Surplus LO Tahun 2023 sebesar Rp31,6 triliun. Surplus LO Tahun 2023 merupakan yang pertama kali terjadi sejak penerapan akuntansi berbasis akrual atau sejak laporan operasional mulai disusun pada 2015.

Pemerintah melaporkan arus penerimaan dan pengeluaran kas negara melalui Laporan Arus Kas. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Investasi menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi berupa barang modal. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN.

Laporan Arus Kas Tahun 2023 memberikan informasi mengenai arus penerimaan dan pengeluaran kas negara selama tahun 2023. Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi minus Rp34,8 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Investasi minus Rp391,6 triliun, arus kas bersih dari Aktivitas Pendanaan Rp445,8 triliun, dan arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Rp88,7 triliun. Arus kas bersih dari Aktivitas Investasi yang bernilai negatif mencerminkan upaya Pemerintah untuk melakukan investasi terutama dalam rangka mendukung proyek pembangunan infrastruktur.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam Laporan Perubahan Ekuitas dapat kami sampaikan bahwa Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp3.404,9 triliun. Setelah memperhitungkan Surplus Laporan Operasional sebesar Rp31,6 triliun, dan Penyesuaian yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas sebesar Rp99,6 triliun, sehingga menghasilkan Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp3.536,1 triliun.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Pemerintah senantiasa berupaya menjaga akuntabilitas secara konsisten, sebagaimana tercermin dari **keberhasilan Pemerintah mempertahankan opini WTP atas LKPP sejak tahun 2016.** Namun demikian, Pemerintah juga akan terus melakukan penguatan agar informasi yang disajikan dalam LKPP semakin berdaya guna dalam

pengambilan kebijakan, memiliki manfaat nyata yang lebih luas, serta mendukung pencapaian kesejahteraan masyarakat dan tujuan nasional.

Dalam hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023, disampaikan 14 temuan yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk ditindaklanjuti guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara di masa mendatang. Tindak lanjut yang akan dilakukan Pemerintah, antara lain:

1. Berkenaan dengan temuan mengenai pelaporan keuangan dan kinerja, Pemerintah akan mengoordinasikan terwujudnya integrasi sistem akuntabilitas kinerja dengan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, untuk meningkatkan kualitas belanja negara.
2. Menindaklanjuti temuan tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai, Pemerintah berkomitmen untuk senantiasa mendorong penyelesaian permasalahan di bidang perpajakan melalui evaluasi dan penyempurnaan proses bisnis untuk menghindari kesalahan pencatatan di masa yang akan datang.
3. Terhadap temuan mengenai Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Piutang PNBP pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh dan mengembangkan menyempurnakan implementasi *Automatic Blocking System*. Selanjutnya, Pemerintah juga akan mengakselerasi optimalisasi penagihan Piutang PNBP melalui langkah-langkah strategis seperti restrukturisasi dan pelaksanaan *crash program*. Di samping itu, Pemerintah akan melakukan *risk profiling* terhadap K/L yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan PNBP dan mengoordinasikan APIP untuk melakukan pengawasan serta senantiasa meningkatkan kompetensi SDM terkait dalam pengelolaan PNBP.
4. Atas temuan mengenai rekonsiliasi volume dan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) tahun 2020 s.d. 2023, Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan rekonsiliasi secara berkala dan menyampaikan pemutakhiran atas perhitungan penyesuaian penerimaan bagian pemerintah dan faktor pengurang penerimaan pemerintah sesuai dengan pelaporan keuangan TA 2023, serta menyelesaikan evaluasi secara menyeluruh atas pelaksanaan HGBT di bidang penyediaan tenaga listrik atas keseluruhan aspek dengan mempertimbangkan hasil evaluasi secara komprehensif dari kementerian teknis terkait.
5. Berkaitan dengan temuan penganggaran *mandatory spending* bidang pendidikan pada APBN Tahun 2023, Pemerintah mengupayakan penyusunan dan penyempurnaan mekanisme pemantauan anggaran *mandatory spending* bidang Pendidikan, baik

terhadap pengalokasian anggaran dan realisasinya maupun atas ketercapaian *output* dan *outcome* dari pelaksanaan anggaran dibandingkan perencanaannya. Selanjutnya, pemerintah berupaya untuk terus memperbaiki mekanisme perencanaan, program dan kegiatan serta penandaan anggaran pendidikan dalam rangka mendukung pengalokasian anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan serta dapat memenuhi kaidah *money follow program* dan penganggaran berbasis kinerja serta prinsip belanja berkualitas sesuai peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, Pemerintah juga berkomitmen untuk melaksanakan secara konsisten kebijakan *automatic adjustment* dengan mempertimbangkan adanya anggaran *mandatory spending* bidang pendidikan.

6. Sehubungan dengan temuan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada K/L, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah akan melanjutkan berbagai langkah mitigasi permasalahan belanja, antara lain melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, Forum Pelaksanaan Anggaran, dan Klinik Pelaksanaan Anggaran, untuk memastikan bahwa penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja pada K/L dilaksanakan sesuai ketentuan.
7. Berkenaan dengan temuan mengenai perencanaan dan penganggaran atas kebijakan pemberian insentif perpajakan (subsidi DTP), Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antar instansi sehingga perencanaan dan penganggaran belanja subsidi DTP lebih optimal dan mendorong peningkatan pemanfaatan teknologi dan informasi agar proses pertukaran data yang diperlukan dapat dilakukan secara *host to host*.
8. Mengenai temuan perencanaan dan penganggaran alokasi DAU *Specific Grant* Tahun 2023 untuk dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pemerintah akan meningkatkan kolaborasi lintas instansi guna memperoleh data yang semakin akurat dan andal sebagai dasar pertimbangan perhitungan dan penyaluran DAU.
9. Sehubungan dengan temuan mengenai pengendalian pelaksanaan kebijakan *prefunding*, dapat kami sampaikan bahwasanya Pemerintah senantiasa berupaya maksimal dalam memenuhi kaidah-kaidah Pemerintahan yang baik. Pemerintah berupaya untuk mendorong penguatan tata kelola pelaksanaan *prefunding*, agar kebijakan pemenuhan pembiayaan dapat dilaksanakan dengan *prudent* namun tetap *agile* dalam menghadapi dinamika kondisi perekonomian dan pasar keuangan domestik maupun global. Pemerintah akan menyusun kajian pengaturan dalam Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah serta menyiapkan aturan tata kelola pelaksanaan kebijakan *prefunding*.

10. Atas temuan mengenai pengelolaan Kas dan Rekening pada Kementerian/Lembaga, dalam rangka meningkatkan kompetensi Bendahara, Pemerintah akan melaksanakan program *refreshment online* dan menyediakan pelatihan *mandatory* bagi Bendahara Satuan Kerja berupa *e-learning* yang bersifat *open access*. Sementara dari sisi sistem, pemerintah mengupayakan implementasi proses bisnis baru antara lain dengan melaksanakan *User Acceptance Test* (UAT) dalam pelaksanaan Pelaporan Saldo Rekening Satker K/L pada aplikasi SAKTI melalui MONSAKTI.
11. Sehubungan dengan temuan mengenai tindakan penagihan aktif piutang pajak, Pemerintah akan melakukan inventarisasi atas piutang macet yang belum daluwarsa penagihan sampai dengan Juli 2024 dan melakukan tindakan penagihan aktif sesuai ketentuan.
12. Berkaitan dengan temuan mengenai pengaturan persetujuan perubahan penggunaan PMN yang belum dimanfaatkan, Pemerintah akan melakukan harmonisasi dan sinkronisasi atas peraturan terkait perubahan penggunaan PMN dengan memperhatikan kewenangan Kementerian Keuangan dan kementerian BUMN, serta menindaklanjutinya sesuai hasil harmonisasi dan sinkronisasi tersebut.
13. Mengenai temuan Pengelolaan Persediaan, Aset Tetap, Properti Investasi, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain, Pemerintah akan menyempurnakan sistem informasi agar lebih optimal berperan dalam penatausahaan barang milik negara, melanjutkan proses identifikasi aset properti investasi pada Kementerian/Lembaga, memperbaiki mekanisme rekonsiliasi barang milik negara, dan menyempurnakan Kebijakan Akuntansi akuntansi Pemerintah Pusat terkait dengan transaksi persediaan.
14. Berkaitan dengan temuan mengenai pelaksanaan anggaran melalui mekanisme Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran, Pemerintah akan melakukan penyempurnaan regulasi, kebijakan akuntansi, dan mengoptimalkan pemanfaatan sistem dalam rangka monitoring transaksi.

Pimpinan dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang kami hormati,

Demikian Keterangan Pemerintah mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2023. **RUU ini kami ajukan untuk dilakukan pembahasan** dan selanjutnya kami mintakan persetujuan untuk dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Semoga ketulusan, kerja keras, integritas, dan kerja sama yang baik, dapat menjadi modal kita untuk terus memberikan **upaya maksimal dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia**. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati usaha kita bersama dalam mewujudkan Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Terima kasih,

Wallohul muwaffiq ila aqwamith-thariq.

Wassalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om.

**a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan**

ttd

Sri Mulyani Indrawati